PERBAIKAN SALURAN IRIGASI DIPERCEPAT

Aliran Selokan Mataram Normal 22 Oktober

SLEMAN (KR) - Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) terus berupaya memperbaiki saluran drainase yang melintas di bawah Selokan Mataram Dusun Mayangan Trihanggo Gamping Sleman. Hingga Sabtu (17/10), drainase yang rusak sudah ditutup dengan beton cyclop. Diperkirakan aliran air di Selokan Mataram bisa normal kembali tanggal 22 Oktober mendatang.

Subkoordinator Perencanaan OP Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) Antyarsa Ikanadani menerangkan, perbaikan drainase di bawah Selokan Mataram yang berlubang sudah ditutup dengan beton cyclop. Termasuk dampaknya terhadap tanggul Selokan Mataram sisi selatan yang tergerus. Sehingga berongga dan kemudian ditutup beton cyclop. "Supaya perbaikannya tidak memakan waktu yang lama. Hari ini (18/10) sedang dilakukan perbaikan tanggul sisi utara," jelasnya kepada *KR*, Minggu (18/10).

Dani menargetkan Senin (19/10) sudah selesai proses perbaikannya. Hanya untuk pengaliran airnya menunggu beton tersebut benar-benar kering. Diperkirakan minimal paling tidak 7 hari. "Diperkirakan air akan dialirkan hari Kamis (22/10) mendatang," imbuh Dani.

Dani tak menampik aliran Selokan Mataram dibutuhkan oleh petani dan pembudidaya ikan. Dalam hal ini pihaknya hanya bisa berusaha mempercepat proses perbaikan saluran drainase tersebut. "Dalam hal ini, kami hanya menunggu umur beton saja supaya cukup keras walaupun minimal 7 hari. Kalau untuk lebih optimal lagi tingkat kekerasannya 14 atau 28 hari. Tetapi itu juga tidak mungkin karena terlalu lama. Saat ini juga memasuki masa tanam kedua," tandas Dani.

Ketua Forum Petani Kalasan Sleman Janu Riyanto menambahkan, jika masa perbaikan 7 hingga 10 hari masih terbilang aman bagi para petani. Lahan pertanian masih bisa bertahan meski tidak ada aliran air dari Selokan Mataram. Pihaknya juga sangat berterimakasih atas perhatian dari BBWSSO yang langsung mengerjakan kerusakan demi para petani.

Untuk sementara para petani mengandalkan sumur pompa untuk pengairan. "Kalau mempengaruhi jelas namun karena ini kerusakan kita harus sabar nunggu perbaikan. Harapan kami semoga bisa segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kerugian bagi para petani," beber Janu. **(Aha)-f**

Melanggar, 24 APK Ditertibkan Bawaslu

BANTUL (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Dari penyisiran yang dilakukan di 4 Kecamatan, Bawaslu menertibkan 24 APK yang kategori melanggar.

Anggota Bawaslu, Nuril Hanafi, Minggu (18/10), menuturkan penertiban APK dilakukan pada Sabtu (17/10). Penertiban dilakukan di 4 kecamatan yakni Sewon, Banguntapan, Pleret, dan Srandakan. "Penertiban APK ini fokus pada beberapa titik yang ditemukan adanya baliho yang merupakan program dan menggunakan anggaran dari Pemkab, namun memuat foto salah satu pasangan calon peserta Pilkada Bantul,"jelas Nuril.

Hal ini imbuhnya sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pasal 71 ayat 3 UU No 10 Tahun 2016. Baliho sejenis awalnya cukup banyak tersebar dan terpasang di berbagai penjuru wilayah Bantul.

Bawaslu Bantul telah membuat imbauan secara tertulis maupun lisan kepada Pemkab Bantul dan telah ditindaklanjuti dengan penurunan baliho tersebut.

"Meski demikian ada beberapa titik yang tercecer dan belum diturunkan, sehingga dilakukan penertiban oleh tim kabupaten yang terdiri dari Satpol PP, KPU, Bawaslu, Polres, Kodim, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)," jelasnya.

Selain itu juga ditertibkan APK yang berada di sekitarnya, namun tata cara dan lokasi pemasangannya tak sesuai dengan regulasi pada PKPU No 11 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bantul No 112 Tahun 2020, dan Keputusan KPU Bantul No 343 Tahun 2020.

"APK yang ditertibkan adalah yang dinyatakan melanggar terkait tata cara dan lokasi pemasangannya sesuai dengan yang terdapat dalam regulasi tersebut," tegasnya.

APK yang ditertibkan sebanyak 24 buah terdiri dari baliho 16 buah, bendera 2 buah, rontek 5 buah dan 1 buah spanduk. "Kami berharap penertiban ini menyadarkan para peserta pemilihan, tim kampanye, pendukung, relawan dan para simpatisannya agar memasang APK sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku," tutupnya. **(Aje)-f**

BERIKAN HAK SUARA BAGI WARGA BINAAN

KPU Dirikan TPSK di Rutan Bantul

BANTUL (KR) - KPU Bantul menambah 1 Tempat Pemungutan Suara Khusus (TPSK) di Kompleks Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bantul di Pajangan untuk pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho, Minggu (18/10), rencana pendirian TPSK di Rutan Bantul sudah dilakukan koordinasi dengan Kepala Rutan Bantul maupun jajarannya.

"Pendirian TPSK di Rutan Pajangan, petugas akan melibatkan pegawai rutan, sehingga TPSK Rutan selain untuk memberikan hak suara bagi warga binaan juga untuk pegawai rutan," jelas Didik.

Sedangkan data warga binaan sampai dengan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 ada sekitar 109 orang dan sampai saat ini yang sudah pasti masuk Daftar Pemilih Tetap ada 39 orang. Selain itu, KPU juga telah melakukan koordinasi dengan Polres Bantul terkait dengan hak suara bagi sejumlah tersangka kejahatan yang ditahan di Polres Bantul.

Pada saat pemungutan suara, jika masih berada dalam tahanan, mereka bisa dititipkan ikut pemungutan suara di TPSK Rutan Pajangan. "Sehingga walaupun berstatus tahanan, tapi tetap mempunyai hak suara," imbuh Didik.

Sementara KPU Bantul telah menetapkan DPT yang jumlahnya 704.688 pemilih. Dibanding dengan angka Daftar Pemilih Sementara (PDS) 705.651 pemilih, sehingga angka DPT mengalami menurunan sebanyak 963 pemilih. Menurut Didik penurunan angka tersebut sebagian besar karena meninggal dunia dan lainnya mutasi penduduk.

KPU Bantul saat ini masih memeriksa kesehatan bagi 14.590 petugas KPPS se Bantul di 27 Puskesmas, untuk memastikan petugas tidak terpapar Covid-19. **(Jdm)-f**

KANTOR KEMENAG SLEMAN

Terima Penghargaan Berkinerja Terbaik

KR-Saifullah Nur Ichwan

Sa'ban Nuroni bersama Tulus Dumadi memperlihatkan penghargaan yang diterima.

SLEMAN (KR) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sleman menerima penghargaan sebagai satuan kerja Kementerian/Lembaga Berkinerja terbaik dari Dirjen Perbendaharaan Kanwil DIY. Diharapkan penghargaan ini dapat memotivasi para pegawai di lingkungan Kemenag Sleman.

Kepala Kantor Kemenag Sleman Drs H Sa'ban Nuroni MA menjelaskan, penghargaan yang diterima itu dalam rangka DJPB Award 2020 di Dirjen Perbendaharaan Kanwil DIY. Untuk kategori yang diterima Kemenag Sleman yaitu kategori pagu non belanja pegawai Rp 5 miliar sampai Rp 15 miliar tahun anggaran 2020.

"Alhamdulillah kinerja teman-teman di masa pandemi dapat penghargaan dari Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan Kanwil DIY. Penghargaan ini merupakan bentuk konkret dari motivasi kami, yaitu kompak, semangat dan jaya," kata Sa'ban Nuroni didampingi Kasubag TU Drs H Tulus Dumadi MA, Jumat (16/10).

Menurutnya, penghargaan ini tak luput dari kekompakan unit kerja di lingkungan Kemenag Sleman. Selain itu juga tak lepas keterpenuhannya 12 indikator yang merupakan indeks kinerja pelaksanaan anggaran. "Penghargaan dari Kementerian Keuangan ini baru pertama kali diterima oleh Kemenag Sleman. Diharapkan penghargaan ini dapat memotivasi para pegawai untuk bekerja lebih baik lagi dan meningkatkan prestasi," kata Sa'ban. **(Sni) -f**

Golkar DIY Bangkit

FOKUS MENANGKAN PASANGAN MUSLIMATUN-AMIN PURNOMO

Gandung: Alokasikan Rp 100 Juta, 'Bangun Dusun Sampai Wangun'

Drs HM Gandung Pardiman MM dan Sri Muslimatun berdialog dengan warga.

KR-Istimewa

SLEMAN (KR)- Untuk mempercepat pembangunan desa, di tingkat dusun juga perlu dianggarkan dana khusus. Dengan adanya dana ini, bisa mempercepat pembangunan fisik dan lingkungan yang tertata. Melalui program-program ini juga bertujuan agar terjadi pemerataan pembangunan di Kabupaten Sleman.

Hal ini disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil DIY Drs HM Gandung Pardiman MM dalam acara bazaar dan senam bersama di Dusun Ngentak RT 6 Tirtoadi Mlati Sleman, Minggu (18/10). Dalam acara yang juga dihadiri Cabup Sri Muslimatun, Gandung juga memberi bantuan dana Rp 6 Juta dan masker dalam upaya turut menangkal Covid-19.

Gandung mengatakan, alokasi dana Rp 100 juta tiap dusun, menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman yang diusung Partai Golkar, pasangan Sri Muslimatun dan Amin Purnomo.

Menurut Gandung yang juga Ketua DPD Partai Golkar DIY itu, melalui program ini, pihaknya ingin memberdayakan 'Bangun Dusun Sampai Wangun'. "Dianggarkan Rp 100 juta untuk tiap dusun. Sehingga pembangunan tidak hanya di Depok tapi merata. Meski tingkat RT itu sangat kecil tapi kami tetap memperjuangkan demi masa depan Sleman," papar Gandung.

Gandung mengungkapkan, program Rp 100 juta untuk tiap dusun tersebut bisa diambil dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Gandung menilai, Kabupaten Sleman masih mampu menganggarkan nominal tersebut dari APBD. Namun hal itu tergantung *good will* yang dilakukan. "Dana ini beda dengan dana desa. Dengan adanya dana ini bisa mempercepat kemajuan desa. Lingkungan tertata dan mempercepat pembangunan fisik," kata Gandung, politisi senior Partai Golkar yang memiliki slogan Ikhlas Berjuang Ikhlas Beramal Peduli Semuanya.

Drs HM Gandung Pardiman MM memberi sambutan.

Ia menjelaskan, perjuangan yang dilakukan ini agar tidak terjadi politik dinasti berkepanjangan. Menurut Gandung, hal ini penting dalam pembelajaran demokrasi dan pembelajaran bagi masyarakat. Terlebih Sleman punya banyak orang-orang pintar tetapi mengapa harus tumbuh politik dinasti. "Jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung. Kapasitasnya harus benar-benar teruji, baik langkah-langkah dalam pemerintahan maupun kemasyarakatan," imbuh Gandung.

Gandung juga mengajak agar masyarakat jangan sampai salah pilih dalam Pilkada 2020 mendatang. Dalam hal ini, Golkar fokus dalam memenangkan calon bupati dan wakil bupati yang diajukan yakni pasangan Sri Muslimatun dan Amin Purnomo. "Jangan sampai mengembangkan politik dinasti di kemudian hari. Kita harus mempunyai wawasan yang luas banyak orang pintar, mengapa kita larut politik dinasti," tegas Gandung.

Gandung menegaskan, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung Golkar tidak korupsi dan tidak akan menjaring kekayaan sendiri secara sembunyi-sembunyi. Selain itu juga akan adil terhadap karir Aparatur Sipil Negara (ASN). "Jangan sampai teman-teman ASN digunakan sebagai alat politik. Saya dukung Bawaslu mengawasi secara ketat hal-hal seperti ini," tandas Gandung.

Sementara itu Ketua RT 6 Ngentak Tirtoadi Mlati Sleman Angga Prasetyo mengaku sangat berterimakasih dengan bantuan berupa uang tunai dan masker. Angga menyatakan, hampir 70 persen warganya terdampak adanya pandemi Covid-19. Kebanyakan warga RT 6 bekerja di pabrik dan di toko dan terpaksa dirumahkan karena adanya pandemi Covid-19. "Warga RT 06 belum tersentuh bantuan. Padahal sebagian besar warga kami dari kalangan menengah ke bawah. Bantuan sembako ini bisa membantu warga," urai Angga. **(Aha)-f**

KR-Istimewa

Drs HM Gandung Pardiman MM menyerahkan bantuan masker

KR-Istimewa

Drs HM Gandung Pardiman MM bersama Sri Muslimatun memberi salam perjuangan.